

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ade Saptomo, 2009. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris* Murni, Trisakti, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Astim Riyanto, 2002. *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo.
- Bagir Manan (ed), 1996. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Essai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, SH., Jakarta: Gaya Media Pratama.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama.
- E. Utrecht, 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Krisna Harahap, 2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami.
- Manisuli Ssenyonjo, 2009. *Economic, Social and Cultural Right in International law*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
- Marwati Riza, 2009. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, As Publishing, Makassar.
- M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, 1983. *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000. *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media, Edisi Revisi, Cetakan Keempat.
- Padmo Wahjono (2), 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua.
- Padmo Wahyono (1), 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : In-Hill Co.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, et al, 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Cet. I.
- _____, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Sri Soemantri Martosoewignyo, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cet. II.
- Soerjono Soekanto, 2000. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet. Ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, Cet. Ke-10.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syamsul Bahri, 2005. *Politik Hukum Perburuhan*, Rangkang Education, Yogyakarta, Cet. I.
- Usep Ranawijaya, 1983. *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia.

B. Jurnal Hukum dan Karya Ilmiah

- Asri Lasatu, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Normatif Pekerja Dalam Sistem Hubungan Industrial*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016
- Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 27 Maret 2020.
- Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

- Rukmana Amanwinata, 1996. "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.
- Syamsul Bahri, 2009. Dimensi Hukum dan Demokrasi Kehadiran Calon Presiden Independen, *Jurnal Konstitusi*, Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. I No. 1 November 2009.
- Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice), Article in SSRN Electronic Journal, May 2009. <https://www.researchgate.net/publication/308803683>
- Wibowo Alamsyah, 2004. Perlindungan HAM Dalam Penangkapan dan Penahanan pada Proses Penyidikan, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

D. Sumber Lainnya

Arif Hidayat, "Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan" dalam Antara News, <http://www.antaranews.com>, diakses tanggal 12 November 2011.

Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020.

Laporan Gubernur Sulawesi Tengah terkait percepatan pemulihan dampak bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Palu, Sulawesi Tengah, Tahun 2018.

<http://www.bumn.go.id/ptpn4/berita/1297>.